

## ABSTRAK

Dalam pelaksanaannya, APBD sering sekali mengalami permasalahan. APBD harus mampu diandalkan dalam mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem atau tatanan yang tepat dan hasil yang sesuai dengan keadaan serta komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam penyusunan suatu anggaran daerah. Jika dalam sistem penganggaran dalam APBD tidak tepat, maka dapat menimbulkan adanya kesenjangan anggaran. Anggaran publik dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau pengeluaran yang terjadi di masa lalu.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Asimetri Informasi dan Partisipasi Anggaran sebagai variabel independen sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah Kesenjangan Anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi dan partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung tahun 2019.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda dengan menggunakan dengan waktu penelitian tahun 2019. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 43 yang terdiri dari Kasubag Perencanaan pada setiap SKPD Kota Bandung. Hasil penelitian ini dibantu menggunakan *software* IBM SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dan partisipasi anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Secara parsial, asimetri informasi berpengaruh positif pada kesenjangan anggaran. Partisipasi anggaran juga memiliki pengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran pada SKPD Kota Bandung.

Terkait masalah penyusunan anggaran untuk Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung tahun 2019 hendaknya dapat menurunkan kesenjangan anggaran dengan cara mengawasi dengan ketat anggaran yang diajukan dan memperkecil tingkat asimetri informasi antara manajemen tingkat puncak dengan manajemen tingkat bawah.

Dari aspek partisipasi anggaran, sebaiknya SKPD Kota Bandung menciptakan partisipasi yang sesungguhnya bukan partisipasi semu, sehingga konsep partisipasi dalam penyusunan anggaran harus dipantau dengan baik oleh atasan untuk memperkecil kecenderungan terciptanya kesenjangan dalam anggaran SKPD Pemerintah Kota Bandung dapat dikendalikan.

**Kata Kunci: Asimetri Informasi, Partisipasi Anggaran dan Kesenjangan Anggaran**